

LAPORAN KOMITE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERJAAN



EXECUTIVE SUMMARY

1. Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance Triwulan I Tahun 2017

Penyelesaian Program Kerja Komite Good Governance sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Bobot	Realisasi (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Assessment GG	10	90%	9
2	Workshop/Pelatihan GG	10	0%	0
3	Penyempurnan Infrastruktur GG	10	80%	8
4	Sosialisasi GG	10	27%	2.7
5	Self Assessment 85 butir ISSA Guideline on Good Governance	7.5	75%	5.62
6	Penyusunan Parameter Internal Governance Award	10	50%	5
7	Pelaksanaan dan Asistensi Internal Governance Award	10	0%	0
8	Monitoring dan Implementasi sesuai Road Map GG	7.5	0%	0
9	Updating Informasi dan Program Kerja GG dan TJSI pada website	7.5	0%	0
10	Penilaian dan Penganugerahan Internal Governance Award	10	0%	0
11	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG	7.5	25%	1.87
Penyelesaian Program Kerja				32.19

2. Assessment Good Governance 2016

Lembaga konsisten untuk melaksanakan *assessment good governance* dalam rangka mencapai keunggulan berkelanjutan dan sebagai wujud komitmen dalam penerapan *good governance*. Berdasarkan *roadmap good governance* tahun 2017 (*sustained*), *assessment good governance* dilakukan secara internal (*self assessment*) oleh Satuan Pengawas Internal yang telah dilakukan *Kick Off Meeting* pada bulan Januari 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Terdapat 6 (enam) aspek pengukuran meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Komitmen Penerapan Good Governance.
2. Dewan Pengawas dan Organ Pendukung.
3. Direksi dan Organ Pendukung.
4. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.

LAPORAN
KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN
TRIWULAN I TAHUN 2017

1. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan *Good Governance* di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan atas:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- e. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- f. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- o. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
- p. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- q. Keputusan Presiden Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2016 – 2021

- r. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/27/012016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
- s. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/173/032016 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
- t. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/437/082016 tentang Penunjukan Wakil Ketua Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.
- u. Surat Perintah Direksi Nomor: SPRIN/19/012017 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan.

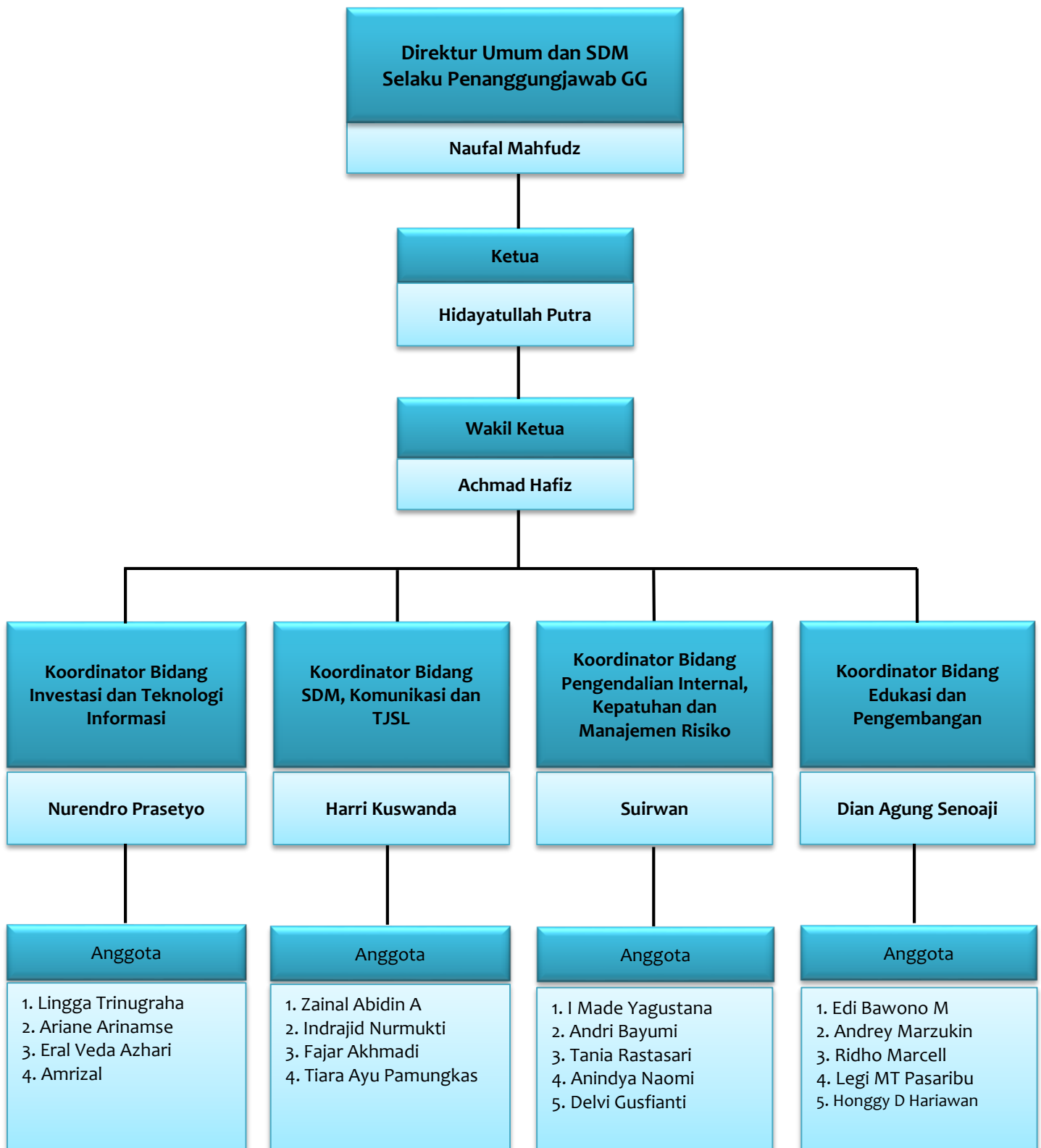
2. KOMITE GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

Berdasarkan Surat Perintah Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: SPRIN/19/012017 tentang Pembentukan Komite Good Governance BPJS Ketenagakerjaan, maka susunan anggota Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM KOMITE
1	Hidayatullah Putra	Kepala Divisi	Sekretaris Badan	Ketua
2	Achmad Hafiz	Kepala Divisi	Divisi Kepatuhan dan Hukum	Wakil Ketua
3	Dian Agung Senoaji	Kaur Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Koordinator Bidang Edukasi dan Pengembangan
4	Suirwan	Kaur Kepatuhan Internal	Divisi Kepatuhan dan Hukum	Koordinator Bidang Pengendalian Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko
5	Harri Kuswanda	Kaur Hubungan Industrial	Divisi Human Capital	Koordinator Bidang SDM, Komunikasi dan TJSL
6	Nurendro Prasetyo	Kaur Pengelolaan Aset dalam Pengawasan Khusus	Divisi Investasi Langsung	Koordinator Bidang Investasi dan Teknologi Informasi
7	I Made Yagustana	Kaur Tata Kelola dan Audit Khusus	Satuan Pengawas Internal	Anggota
8	Andri Bayumi	Kaur Kebijakan Manajemen Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Anggota
9	Zainal Abidin A	Kaur TJSL	Divisi Komunikasi	Anggota
10	Indrajid Nurmukti	Kaur Komunikasi Internal	Divisi Komunikasi	Anggota

11	Ariani Arinamse	Kaur Analisa Pasar Saham	Divisi Analisa Portofolio	Anggota
12	Edi Bawono Maedi	Penata Utama Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
13	Andrey Marzukin	Penata Madya Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
14	Ridho Marcell	Penata Madya Tata Kelola	Divisi Sekretaris Badan	Anggota
15	Legi Handoko MT Pasaribu	Penata Utama Kemitraan Strategis Jaminan Sosial	Divisi Perencanaan Strategis	Anggota
16	Tania Rastasari	Auditor 3	Satuan Pengawas Internal	Anggota
17	Honggy Dwinanda Hariawan	Auditor 1	Satuan Pengawas Internal	Anggota
18	Delvi Gusfianti	Penata Senior Kebijakan Manajemen Risiko	Divisi Manajemen Risiko	Anggota
19	Anindya Naomi	Penata Utama Kepatuhan Internal	Divisi Kepatuhan dan Hukum	Anggota
20	Fajar Akhmadi	Penata Utama TJSL	Divisi Komunikasi	Anggota
21	Tiara Ayu Pamungkas	Penata Madya Pembinaan Karyawan	Divisi <i>Human Capital</i>	Anggota
22	Lingga Trinugraha	Kaur Operasional DC/DRC	Divisi Operasional TI	Anggota
23	Eral Veda Azhari	Ahli Madya IT Operation GRC	Divisi Operasional TI	Anggota
24	Amrizal	Penata Utama Analisa Pasar Utang & Reksadana	Divisi Analisa Portofolio	Anggota

**STRUKTUR KOMITEE GOOD GOVERNANCE
BPJS KETENAGAKERAAN TAHUN 2017**



- b. Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan Triwulan I tahun 2017, adalah sebagai berikut:

No	Program Kerja	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017
1	Pelaksanaan Assessment GG oleh SPI			
1.1	Kick of Meeting Assessment GG	23 Januari 2017		
1.2	Review dokumen		Februari 2017	Maret 2017
1.3	Kuisisioner		Februari 2017	Maret 2017
1.4	Wawancara		Februari 2017	Maret 2017
2	Workshop/pelatihan GG			
2.1	Pelatihan GCG Self Assessment	18-19 Januari 2017		
3	Penyempurnaan Infrastruktur GG			
3.1	Penyesuaian dan review PERDIR/01/042014			
	Review Direksi		Februari 2017	
	Revisi content perdir dari Divisi MRI dan Divisi Renstra			Maret 2017
3.2	Penyusunan Board Manual BPJS Ketenagakerjaan			
	Review Direksi		Februari 2017	
4	Sosialisasi GG			
4.1	Sosialisasi GG pada Rakorda Jabar		2-3 Februari 2017	
4.2	Sosialisasi GG pada Rakorda Sumbarrau		2-3 Februari 2017	
4.3	Sosialisasi GG pada Rakornis Sumbagsel		23 Februari 2017	

c. Pelaksanaan Program Kerja Komite GG BPJS Ketenagakerjaan:

NO	PROGRAM KERJA	PIC	PROGRESS	%
1.	Pelaksanaan Assessment GG	Satuan Pengawas Internal	Masih dilaksanakan Assessment GG	90%
2.	Workshop/pelatihan GG Workshop GCG Self Assessment	Edi Bawono Maedi dan Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan)	Workshop dilakukan dalam rangka persiapan GG Self Assessment	100%
3.	Penyempurnaan Infrastruktur GG			
	a. Review PERDIR/01/042014	SBD	Telah dilakukan review PERDIR/01/042014 dengan UU BPJS dan produk hukum turunan	80%
	b. Review Board Manual	SBD	Draft Board Manual telah selesai	70%
	Average (3) Penyempurnaan Infrastruktur GG			75%
4.	Sosialisasi GG			
	a. Sosialisasi, edukasi GG dan evaluasi IGA 2016 pada Rakorda Jabar.	Dian Agung Senoaji, Andrey Marzukin, dan Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan)	Tanggal 2 & 3 Februari 2017	100%
	b. Sosialisasi, edukasi GG dan evaluasi IGA 2016 pada Rakorda Sumbarriau.	Dian Agung Senoaji, Andrey Marzukin, dan Ridho Marcell (Divisi Sekretaris Badan)	Tanggal 2 & 3 Februari 2017	100%
	c. Sosialisasi edukasi GG dan evaluasi IGA 2016 pada Rakornis Sumbagsel.	Edi Bawono Maedi dan Andrey Marzukin (Divisi Sekretaris Badan)	Tanggal 23 Februari 2016	100%
	Average (4) Sosialisasi 11 Kanwil			27%

NO	PROGRAM KERJA	PIC	PROGRESS	%
5.	Self Assessment 85 butir ISSA <i>Guideline on Good Governance</i>	Komite GG		75%
6.	Penyusunan Parameter <i>Internal Governance Award 2016</i>	Komite GG		50%
7.	Pelaksanaan dan Asistensi <i>Internal Governance Award (IGA)</i>	Komite GG		0%
8.	Monitoring dan Implementasi sesuai <i>Roadmap GG</i>	Komite GG		0%
9.	<i>Updating</i> Informasi dan Program Kerja GG dan TJSL pada <i>website</i>	Divisi Komunikasi		0%
10.	Penilaian dan Penganugerahan <i>Internal Governance Award</i>	Komite GG		0%
11.	Penyusunan Laporan Triwulanan Komite GG Laporan Komite GG Triwulan IV tahun 2016.	Divisi Sekretaris Badan		100%
Total Average				46,09%

4. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Umum dan SDM Nomor: SE/03/022014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Kewajiban Melaporkan LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan, maka mulai tahun 2014 penyampaian laporan LHKPN diterapkan untuk Pejabat di BPJS Ketenagakerjaan dari Pejabat Level I sampai dengan Pejabat Level III dan Direktur PT. Bijak. Posisi *update* LHKPN yang masuk ke Divisi HCP sampai dengan Tanggal 31 Januari 2017 adalah sebagai berikut:

NO	PEJABAT WAJIB LAPOR	JML	LHKPN s.d Januari 2017			
			SUDAH		BELUM	
			JML	%	JML	%
1	Level 1 & 2	269	242	89,96%	27	10,04%
2	Level 3	702	644	91,74%	58	8,26%
	TOTAL	971	886	91,25%	58	5,97%

LHKPN Dewan Pengawas dan Direksi telah disampaikan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 30 Maret 2016.

5. ASSESSMENT GOOD GOVERNANCE BPJS KETENAGAKERJAAN

Sesuai dengan Peraturan Direksi nomor PERDIR/39/092015 tentang Indikator/Prameter Penilaian (*Assessment*) dan Pengukuran atas Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Governance*) BPJS Ketenagakerjaan, *assessment good governance* dilakukan setiap tahun. Hasil atas pelaksanaan *assessment* tersebut dituangkan dalam bentuk indeks dan *area of improvement*. Melalui *assessment* ini, sekaligus dapat diperoleh *gap analysis* antara aktivitas dan inisiatif yang dilakukan lembaga dengan ketentuan atau standar penerapan terbaik (*best practices*) sehingga didapatkan rekomendasi bagi manajemen. Berdasarkan *road map* gg tahun 2017 (*sustained*), *assessment good governance* dilakukan secara internal (*self assessment*) oleh Satuan Pengawas Internal. Pelaksanaan *self assessment* tahun ini diawali dengan *Kick off Meeting* pada tanggal 23 Januari 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini. Adapun metodologi pelaksanaan *self assessment* adalah sebagai berikut:

1. *Review* dokumen

Pihak asesor melakukan telaah dokumen GG, seperti GG Code, Code of Conduct, Charter SPI, Charter Komite Pengawas dan berbagai kebijakan serta aturan dalam penerapan GG.

2. Kuisisioner

Asesor menerbitkan serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada organ lembaga, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, seluruh Kadiv, Kakanwil, Kakacab dan KaKCP (*sampling*).

3. Wawancara

Wawancara umumnya dilakukan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Kadiv (sampling), Kakanwil (sampling) dan Kakacab (sampling) untuk melakukan pendalaman informasi atas berbagai informasi awal yang diperoleh melalui review dokumen dan kuisisioner.

6. WORKSHOP/PELATIHAN GG

Perwakilan 2 (dua) staf dari Urusan Tata Kelola telah mengikuti pelatihan GCG *Self Assessment* yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Januari 2017 di Hotel Aston TB Simatupang Jakarta, yang diselenggarakan oleh Konsultan Dinamika Pasifik Solusindo. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pihak internal dalam menilai atau mengukur proses yang telah dilakukan lembaga dalam penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga. Kelebihan dari metode *self assessment* ini adalah dapat dengan mudah menilai sendiri bagaimana penerapan *good governance* di lembaga. *Self Assessment* harus dilakukan secara jujur dan obyektif sehingga menghasilkan indeks GG yang mencerminkan kondisi penerapan *good governance* di lembaga.

Modul pelatihan yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria dan Indikator Assessment GCG.
2. GCG Assessment Worksheet & GCG Assessment Result Analysis.
3. Praktik penilaian Assessment GCG (*scoring GCG*) dan *Assessment Best Practices*.
4. Langkah-langkah melakukan Assessment (*Self Assesment*) dan Assessment Eksternal.
5. Praktek Penilaian Assessment GCG (*scoring GCG*).
6. Identifikasi *area improvement* berbasis *assessment* (evaluasi dan perbaikan kualitas GCG).



Workshop GCG Self Assessment

7. SOSIALISASI GOOD GOVERNANCE

Sebagai bagian dari program kerja Komite *Good Governance*, sosialisasi dan edukasi kepada unit kerja menjadi bagian penting dalam internalisasi prinsip-prinsip *good governance* dan infrastruktur pendukungnya. Sampai dengan Triwulan I 2017, Komite GG telah melakukan sosialisasi pada 3 kantor wilayah dan juga kantor cabang jajarannya melalui momen Rakorda dan Rakornis, yaitu: Kanwil Jabar, Kanwil Sumbarriau dan Kanwil Sumbagsel.



Sosialisasi GG di Rakorda Sumbarriau



Sosialisasi GG di Rakornis Sumbagsel

8. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan Manajemen Risiko:

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA
1	1 - 24 Februari 2017	Sosialisasi pengkinian kebijakan manajemen risiko dan penyusunan profil risiko menggunakan aplikasi SIMRK kepada Risk Agent & Risk Owner Kacab/Kanwil dan Kapu.	Sosialisasi untuk Kacab dan Kanwil di 11 Kanwil dan sosialisasi untuk Kapu di Learning Center Bogor	Risk Agent seluruh Cabang, Risk Owner Kanwil.
2	2 - 8 April 2017	Upgrading KKCP tentang pengelolaan manajemen risiko	Learning Centre Bogor	Kepala KCP Mandiri
3	11 - 13 April 2017	Pertemuan dengan group head manajemen mutu & risiko wilayah: pembahasan rencana kerja dan pemantauan profil risiko badan TW 1 tahun 2017	Palembang	Group Head MMR, Penata MMR dan Personil MRI

9. FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)

- a. Kegiatan FGD Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dengan Implementasi PP 70 Tahun 2015.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 23-25 Februari 2017 di Hotel Nagoya Hills, Batam. Kegiatan ini dihadiri oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Keuangan, Kepala Divisi Renstra, Kepala Divisi Akutansi, Kepala Kantor Wilayah Sumbarriau, Kepala Kantor Cabang di wilayah Kepulauan Riau dan perwakilan urusan dari divisi-divisi yang terkait.

Pembahasan FGD ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Evaluasi terhadap implementasi UU 40 tahun 2011.
- Pemaparan latar belakang PP 70 tahun 2015.
- Diskusi usulan strategi harmonisasi PP 70 tahun 2015 terhadap UU 40 tahun 2011.

- b. Kegiatan *forum group discussion* percepatan penyusunan *draft* Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret – 1 April 2017 di Pullman Hotel, Bali. Kegiatan ini dihairi oleh Direktur Keuangan Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Menteri Keuangan RI, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan Hukum, Divisi Perencanaan dan Strategis, Divisi Akuntansi dan Divisi Sekretaris Badan.

Maksud dan tujuan FGD ini adalah:

- Membangun hubungan antar lembaga dengan Kementerian Keuangan.
- Melakukan langkah awal harmonisasi Peraturan Perpres Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pembahasan FGD ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Pemaparan *Timeline* Penyusunan Peraturan Perpres Tata Kelola Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial
- Pemaparan Daftar Inventarisasi Masalah.
- Diskusi usulan Isi Peraturan Presiden Tata Kelola Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.



FGD Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan



FGD Penyusunan draft Perpres Tata Kelola BPJS



FGD Penyusunan draft Perpres Tata Kelola BPJS

10. RAPAT KOMITE

Tingkat kehadiran rapat Komite GG BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Maret 2017 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	UNDANGAN RAPAT	KEHADIRAN	%
1	Hidayatullah Putra	1	1	100
2	Achmad Hafiz	1	0	-
3	Dian Agung Senoaji	1	1	100
4	Suirwan	1	0	-
5	Harri Kuswanda	1	0	-
6	Nurendro Prasetyo	1	1	100
7	I Made Gede Yagustana	1	1	100
8	Andri Bayumi	1	0	-
9	Zainal Abidin A	1	0	-
10	Indrajid Nurmukti	1	0	-
11	Ariani Arinamse	1	0	-

12	Edi Bawono Maedi	1	0	-
13	Andrey Marzukin	1	1	100
14	Ridho Marcell	1	0	-
15	Legi MT Pasaribu	1	0	-
16	Tania Rastasari	1	1	100
17	Honggy Dwinanda Hariawan	1	1	100
18	Delvi Gustianti	1	0	-
19	Anindya Naomi	1	1	100
20	Fajar Akhmadi	1	0	-
21	Tiara Ayu Pamungkas	1	0	-
22	Lingga Trinugraha	1	0	-
23	Eral Veda Azhari	1	1	100
24	Amrizal	1	1	100

11. MONITORING DAN EVALUASI SESUAI ROAD MAP 2017 (SUSTAINED)

Sesuai dengan *road map* GG tahun 2017 (*sustained*), bahwa lembaga memastikan prinsip-prinsip *Good Governance* telah membudaya dalam aktivitas dan proses bisnis. Lembaga melakukan beberapa aktivitas yang mendukung pencapaian lembaga sebagai *benchmark* penerapan GG di kelembagaan publik antara lain adalah:

1. *Review Model dan Parameter GG Assessment.*
2. *Self Assessment GG oleh SPI.*
3. *Penyusunan Board Manual.*
4. *Sosialisasi GG.*
5. *Internal Governance Award.*
6. *Menyusun Integrated Report.*

NO	MAIN INDIKATOR	AKTIVITAS	HASIL
1	<i>Governance Infrastructure</i>	Melakukan Harmonisasi PERDIR/01/042014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	✓ Draft PERDIR/KEPDIR telah direview oleh Divisi Kepatuhan dan Hukum dan saat ini sedang dalam proses review dan paraf Direksi.
2	<i>Governance Assessment</i>	Pelaksanaan <i>self assessment</i> tahun ini dilakukan secara internal oleh Satuan Pengawas Internal.	✓ Pelaksanaan <i>self assessment</i> masih berlangsung hingga saat ini.

3	<i>Master Plan CSR</i>	Kegiatan dijalankan berdasarkan program kerja sebagaimana RKAT 2016 dan pedoman program TJSL	✓	Masih dilakukan review oleh Direksi
4	<i>Review Kematangan Risk Management</i>	<i>Assessment</i> Tingkat Kematangan Manajemen Risiko.	✓	Telah dilaksanakan <i>assessment</i> oleh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
5	<i>Transparency & Disclosure</i>	Pengungkapan informasi dan <i>update good governance</i> .	✓	<i>Update</i> info GG pada <i>website</i>
6	<i>Internal Stakeholder Engagement</i>	Mengikuti kegiatan <i>workshop/pelatihan</i> terkait <i>good governance</i> .	✓	Telah dilakukannya sosialisasi dan edukasi di 3 Kantor Wilayah. ✓ Pelatihan GCG <i>Self Assessment</i> .
7	<i>Annual Report dan Sustainability Report</i>	Telah disusun <i>Integrated Report</i> yang merupakan gabungan dari <i>Annual Report</i> dan <i>Sustainability Report</i> .	✓	Dalam penyusunan <i>Integrated report</i> , Divisi Komunikasi sebagai PIC melibatkan Trisakti <i>Sustainability Center</i> ✓ Keikutsertaan dalam <i>award</i> belum dapat dilakukan karena belum adanya kategori untuk Badan Hukum Publik.

Jakarta, April 2016

Hidayatullah Putra
Kepala Divisi Sekretaris Badan
selaku Ketua Komite Good Governance

